

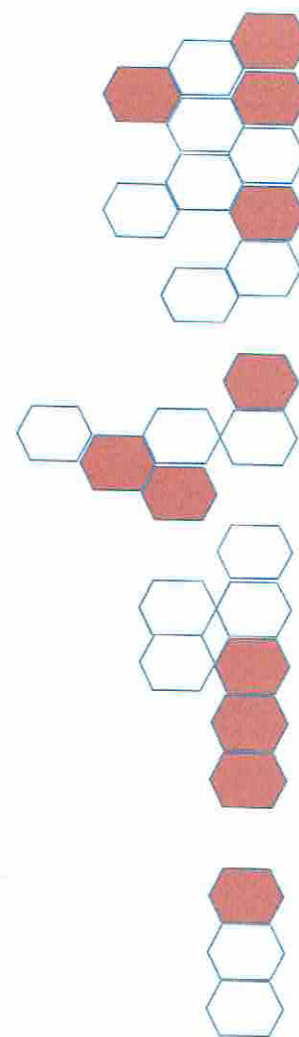
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2019



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menciptakan *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai padoman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Penamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerapan SPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat sehingga diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2011 tentang penyelenggaraan system pengendalian intern Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Inten Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

III. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut

dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebihdiutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan rewiuw lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;

Seluruh lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2 : Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian

	Tanggung Jawab	tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

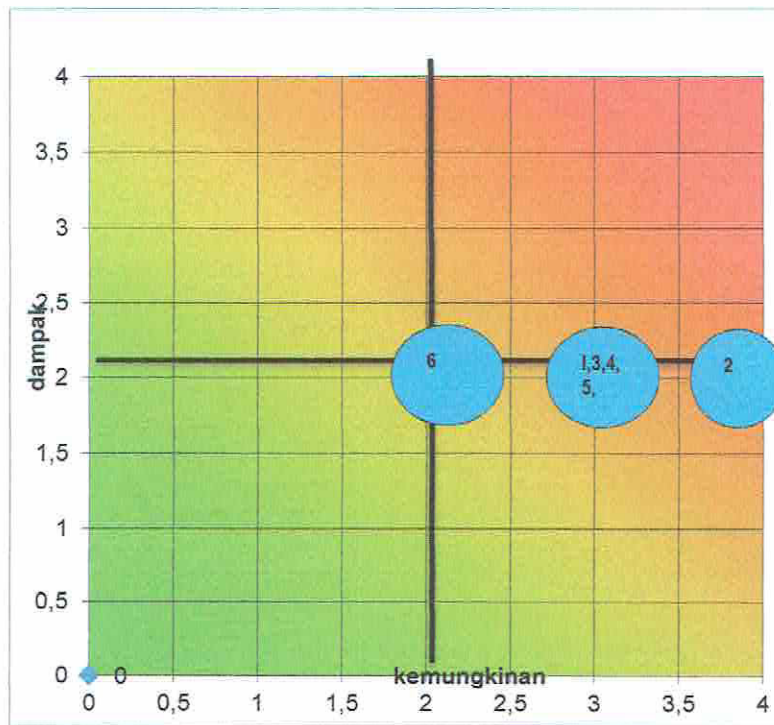
- Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan
- Kurang lengkapnya update data jalan dalam kondisi mantap
- Kurang tercapainya persentase jalan dalam kondisi mantap tiap tahunnya

karena adanya overload beban muatan pada jalan

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Keterbatasan anggaran dalam penggantian jembatan yang rusak
- Kurang lengkapnya data jumlah jembatan dalam kondisi baik

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai

berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan jalan kabupaten
 - 1. Pengusulan Dana Ke APBN
 - 2. Update data jalan sudah di input
 - 3. Adanya pemasangan rambu jalan
 - b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten
 - 1. Pendataan jumlah jembatan dilakukan pada tahun berjalan
 - 2. Pengusulan dana melalui proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum
 - c. Kegiatan Pembangunan SPAM IKK
 - 1. Pengusulan dana Ke APBN
- D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
- 1. Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan
 - 2. Adanya pengawasan di berbagai pihak pada tonase kendaraan yang memakai jalan
 - 3. Butuhnya percepatan Pendataan data jembatan dalam kondisi baik
 - 4. SOP pengadaan, Renja dan Renstra
- Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi. Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Peningkatan Jalan
 - Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
 - Dokumen
 - Rakor
- b. Kegiatan Peningkatan Jembatan kabupaten
 - Dokumen
 - Jadwal Kunjungan/ sosialisasi
 - Undangan dll
- c. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum
 - Undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
 - MOU dll

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan,
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan,
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

BAB VII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Pesisir Selatan, April 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERASUKMA MUNAF, ST. MM
Pembina Tk. 1.
NIP. 19720925 199803 1 003

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi :

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1. Peningkatan Jalan Kabupaten 2. Pembangunan Jalan Kabupaten 3. Pembangunan Jembatan Kabupaten 4. Pemeliharaan Jalan Kabupaten 5. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten 6. Pembangunan saluran drainase dan trotoar
			2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	1. Pembangunan Infrastruktur air minum 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan 3. Pembangunan Prasarana Sanitasi 4. Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas 5. Pengembangan Hibah Air Minum 6. Pembangunan Pamsimas Reguler
			3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Pembangunan Gedung kantor 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
		2. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	1. Meningkatkannya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang
			2. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1. Operasional Kebersihan dan Persampahan

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	selaras	
2	Pembangunan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	selaras	
3	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	selaras	
4	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	selaras	
5	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	selaras	
6	Pembangunan Saluran Drainase Dan Trotoar	Jumlah Saluran Drainase / Gorong- Gorong Yang Terbangun	selaras	
7	Pembangunan Infrastruktur air minum	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	selaras	
8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	selaras	
9	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	selaras	
10	Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	selaras	
11	Pengembangan Hibah Air Minum	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	selaras	
12	Pembangunan Pamsimas Reguler	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	selaras	
13	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	selaras	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	selaras	
15	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	selaras	
16	Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	selaras	
17	Operasional Kebersihan dan Persampahan	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	selaras	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran di atasnya (strategis)

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase jalan kondisi mantap belum tercapai
2	Pembangunan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase jalan kondisi mantap belum tercapai
3	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	Keterbatasan anggaran dalam penggantian jembatan yang rusak	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Jumlah jembatan dalam kondisi yang layak di lalui tidak tercapai
4	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Tidak tercapainya persentase tiap tahunnya karena banyak jalan yang rusak	Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase pemeliharaan jalan belum tercapai
5	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan jembatan yang rusak	Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase pemeliharaan jembatan belum tercapai
6	Pembangunan Saluran Drainase Dan Trotoar	Jumlah Saluran Drainase / Gorong- Gorong Yang Terbangun	Banyaknya saluran drainase / gorong- gorong yang rusak	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	Persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
7	Pembangunan Infrastruktur air minum	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
9	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
10	Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah sanitasi bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
11	Pengembangan Hibah Air Minum	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
12	Pembangunan Pamsimas Reguler	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai
13	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan permukiman	Kurangnya SDM	Jumlah bangunan pemerintah yang di bangun / di rehab belum tercapai
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan permukiman	Kurangnya SDM	Jumlah bangunan pemerintah yang di bangun / di rehab belum tercapai
15	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang	Kasi Penataan Ruang	Keterbatasan anggaran	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang belum tercapai
16	Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang	Kasi Penataan Ruang	Keterbatasan anggaran	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang belum tercapai
17	Operasional Kebersihan dan Persampahan	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	Banyaknya sampah yang belum tertangani di setiap kecamatan	Kasi Kebersihan	Kurangnya SDM	Persentase sampah yang terlayani belum tercapai

ANALISIS RISIKO

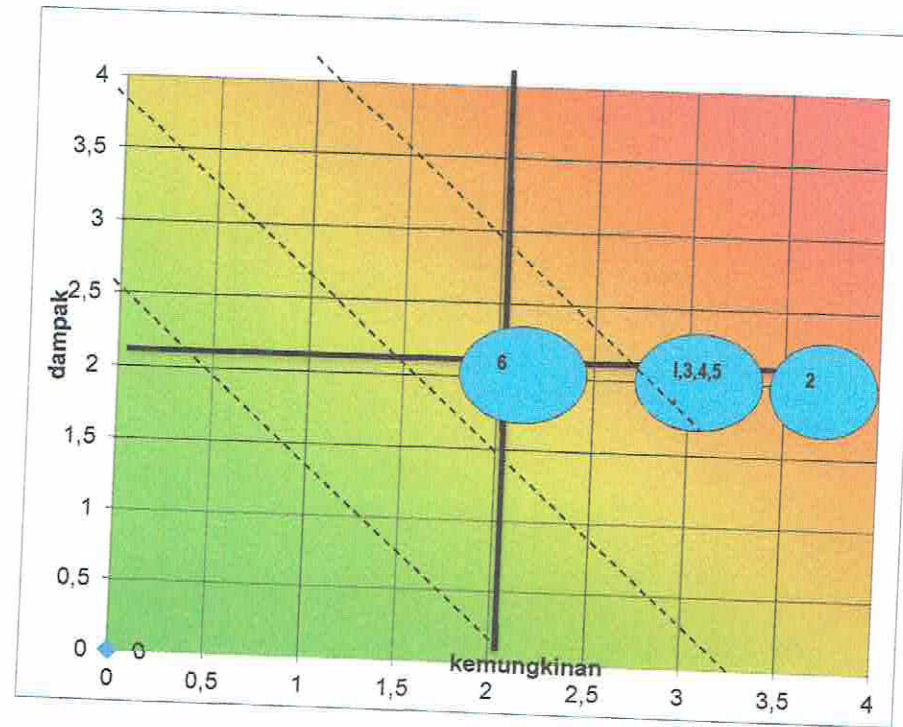
No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	1 Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase jalan kondisi mantap belum tercapai	3,00	2,00	6,00
		2 Kurang lengkapnya update data jalan dalam kondisi mantap	Kasi Perencanaan jalan dan jembatan	Kurangnya SDM	Data Jalan dalam kondisi mantap belum valid	4,00	2,00	8,00
		3 kurang tercapainya persentase jalan dalam kondisi mantap karena adanya overload beban muatan lebih pada jalan	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Jenis Kendaraan Yang Lewat	Kondisi mantap belum tercapai karena kendaraan yang melewati jalan melebihi tonase	3,00	2,00	6,00
		4 Tidak tercapainya persentase tiap tahunnya karena banyak jalan yang rusak	Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase pemeliharaan jalan belum tercapai	3,00	2,00	6,00
2	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	5 Keterbatasan anggaran dalam penggantian jembatan yang rusak	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	jumlah jembatan dalam kondisi yang layak di lalui tidak tercapai	3,00	2,00	6,00
		6 Kurang lengkapnya data jumlah jembatan dalam kondisi baik	Kasi Pembangunan jalan dan jembatan	Kurangnya SDM	Jumlah jembatan dalam kondisi baik belum memadai	3,00	2,00	6,00
		7 Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan jembatan yang rusak	Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan	Keterbatasan anggaran	Persentase pemeliharaan jembatan belum tercapai	3,00	2,00	6,00
				Kurangnya SDM	Kurangnya kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan	3,00	2,00	6,00
3	Jumlah Saluran Drainase / Gorong-Gorong Yang Terbangun	8 Banyaknya saluran drainase / gorong-gorong yang rusak	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Kurangnya SDM	Persentase saluran dalam kondisi baik tidak tercapai	3,00	2,00	6,00
4	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	9 Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai	2,00	2,00	4,00
5	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	10 Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai	2,00	2,00	4,00

No	Tujuan yang diidentifikasi		Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	11	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Kasi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	Keterbatasan anggaran	persentase jumlah sanitasi bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan belum tercapai	2,00	2,00	4,00
7	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	10	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan permukiman	Kurangnya SDM	Jumlah gedung pemerintah yang di bangun / di rehab belum tercapai	2,00	2,00	4,00
8	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	11	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan permukiman	Kurangnya SDM	Jumlah gedung pemerintah yang di bangun / di rehab belum tercapai	2,00	2,00	4,00
9	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	12	Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang	Kasi Penataan Ruang	Keterbatasan anggaran	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang belum tercapai	3,00	2,00	6,00
10	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	13	Banyaknya sampah yang belum tertangani di setiap kecamatan	Kasi Kebersihan	Kurangnya SDM	Persentase sampah yang terlayani belum tercapai	2,00	2,00	4,00

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PESISIR SELATAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana Ke APBN	Kurang efektif	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	OPD	2019
		Kurang lengkapnya update data jalan dalam kondisi mantap	update data jalan dalam kondisi mantap	update data jalan sudah di input	Kurang efektif	perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	PPK/PPTK	2019
		kurang tercapainya persentase jalan dalam kondisi mantap karena adanya overload beban muatan lebih pada jalan	Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (perhubungan dan kepolisian)	adanya pemasangan rambu jalan	Kurang efektif	adanya pengawasan di berbagai pihak pada tonase kendaraan yang memakai jalan	OPD	2019
2	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	Keterbatasan anggaran dalam penggantian jembatan yang rusak	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana melalui proposal	Kurang efektif	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	OPD	2019
		Kurang lengkapnya data jumlah jembatan dalam kondisi baik	Pendataan data jembatan dalam kondisi baik	pendataan jembatan dilakukan pada tahun berjalan	Kurang efektif	perlunya percepatan pendataan jembatan dalam kondisi baik	PPK/PPTK	2019
		Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan jembatan yang rusak	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana melalui proposal	Kurang efektif	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	OPD	2019
3	Jumlah Saluran Drainase / Gorong-gorong Yang Terbangun	Banyaknya saluran drainase / gorong-gorong yang rusak	penanganan pemabangunan saluran drainase yang rusak lebih cepat lagi	adanya penggantian saluran drainase/ gorong2 yang rusak	Kurang efektif	butuh percepatan penanganan	PPK/PPTK	2019
4	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana Ke APBN	Kurang efektif	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	OPD	2019
5	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana Ke APBN	Kurang efektif	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	OPD	2019
6	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kurangnya dana yang diberikan pada OPD bersangkutan	Pengalokasian Dana	Pengusulan Dana Ke APBN	Kurang efektif	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	OPD	2019
7	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Adanya pendataan gedung pemerintah yang rusak	adanya rehab gedung pemerintah	Kurang efektif	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	PPK/PPTK	2019
8	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	Banyaknya gedung pemerintah yang rusak atau di rehabilitasi	Adanya pendataan gedung pemerintah yang rusak	adanya rehab gedung pemerintah	Kurang efektif	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	PPK/PPTK	2019
9	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang	Adanya pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ruang	Adanya pengendalian perencanaan ruang	Kurang efektif	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	PPK/PPTK	2019
10	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	Banyaknya sampah yang belum tertangani di setiap kecamatan	adanya penangan sampah di setiap kecamatan	adanya tempat pembuangan sampah di setiap lokasi	Kurang efektif	Masyarakat	PPK/PPTK	2019

Ket:

- 1 Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 3 Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
- 4 Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
- 5 Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
- 6 Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
- 7 Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
- 8 Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
		isikan sesuai dengan pengendalian yang masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam sheet 6. Keg pengendalian				waktu pelaksanaan kapan menyediakan informasi, BUKAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, rakor	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	2 minggu sebelum pelaksanaan
		perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	Dokumen	PPTK/PPK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	1 tahun
		adanya pengawasan di berbagai pihak pada tonase kendaraan yang memakai jalan	sosialisasi	PPTK/PPK	Masyarakat	1 tahun
2	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, rakor	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	6 bulan
		perlunya percepatan pendataan jembatan dalam kondisi baik	Dokumen	PPTK/PPK	Seluruh staf terkait	1 tahun
3	Jumlah Saluran Drainase / Gorong- Gorong Yang Terbangun	butuh percepatan penanganan	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	1 tahun
4	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	6 bulan
5	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	6 bulan
6	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	6 bulan
7	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	1 tahun
8	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	1 tahun
9	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	Surat undangan, bahan exposit, laptop, infokus, MOU	PPTK/PPK	Masyarakat	1 tahun

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
10	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	Masyarakat	sosialisasi	PPTK/PPK	Masyarakat	1 tahun

Keterangan:

- 1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi
- 2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana
- 3 Kolom 5 : Diisi dengan Kepala Satuan Kerja,
- 4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu,

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	diambil dari Kolom 2 (tujuan yang diidentifikasi) sheet 7. infokom	isikan sesuai dengan pengendalian yang masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam sheet 6. Keg pengendalian	Sudah ada / belum oleh atasan langsung/APIP/tim khusus	Pilih : Pemantauan berkelanjutan / Evaluasi Terpisah / Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)		dapat diisi setelah dilakukan pemantauan, apabila masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari kegiatan pengendalian terpantau
1	Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
		perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	1 kali setahun	
		adanya pengawasan di berbagai pihak pada tonase kendaraan yang memakai jalan	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	1 kali setahun	
2	Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
		perlunya percepatan pendataan jembatan dalam kondisi baik	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	1 kali setahun	
3	Jumlah Saluran Drainase / Gorong-Gorong Yang Terbangun	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
4	Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	butuh percepatan penanganan	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
5	Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
6	Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
7	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
8	Jumlah Gedung Pemerintah yang direhab	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
9	Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata bangunan	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	
10	Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di Ibukota Kabupaten/Kecamatan	butuhnya koordinasi dengan tim TAPD	sudah ada	Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	2 kali setahun	

Keterangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan

3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut